

## STRATEGI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Silya Putri Pratiwi<sup>1</sup>, Dian Kagungan<sup>2</sup>, Eko Budi Sulistio<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung  
silyaputri4@gmail.com

### Abstrak

Pengelolaan hutan dari sisi fungsi produksinya diarahkan menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Gabungan Kelompok Tani Wana Tekat Mandiri mengelola Hutan kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Maraknya penebangan hutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab diluar gabungan kelompok tani. Sehingga kelompok masyarakat yang melakukan penebangan hutan liar tidak mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap Gabungan kelompok Tani di wilayah Kecamatan Sendang Agung. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam Pemanfaatan hutan kemasyarakatan sudah berjalan dengan baik dan pelaksanaan strategi sudah dianggap berhasil di implementasikan, Strategi pembinaan mempunyai tujuan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan dalam melaksanakan kegiatan atau program Gapoktan Wana Tekad Mandiri, yaitu dengan cara mengembangkan keahlian, mengembangkan pengetahuan serta mengembangkan sikap. Adanya strategi Pembinaan ini diharapkan dapat memberikan suatu dampak pemberdayaan yang baik untuk masyarakat.

**Kata Kunci:** Strategi, Pembinaan, HKM, Gapoktan.

### Abstract

*Forest management in terms of its production function is directed towards management that is oriented towards all potential forestry resources and is based on community empowerment. The Wana Tekat Mandiri Farmer Group Association manages community forests, namely state forests whose main use is aimed at empowering the community. The rampant illegal logging is carried out by irresponsible parties outside of the farmer group association. So that community groups that carry out illegal logging do not support the Regional Government in providing guidance to the Association of Farmer groups in the Sendang Agung District area. The type of research used in this research is descriptive type with a qualitative approach, data collection techniques, observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that the strategy of community development and empowerment in community forest utilization has been running well and the implementation of the strategy has been deemed successful in implementation. The coaching strategy has a main objective in the framework of developing a coaching plan in carrying out activities or programs of Gapoktan Wana Tekad Mandiri, namely by how to develop skills, develop knowledge and develop attitudes. The existence of this coaching strategy is expected to have a good empowering impact on the community.*

**Keywords:** Strategy, Development, HKM, Gapoktan.

## I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan harta kekayaan alam yang diatur oleh pemerintah agar memberikan dampak positif terhadap

penyediaan lapangan kerja, mendorong pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi serta mempunyai peran penting sebagai sistem penyangga kehidupan dunia.

Selain itu, hutan bagi masyarakat bukanlah hal yang baru melainkan salah satu sumber daya alam yang mampu menyediakan bahan-bahan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan, obat-obatan, dan pendapatan keluarga, sehingga masyarakat mengupayakan pengelolaan hutan secara lestari agar mereka tetap bisa memanfaatkan hasil hutan di masa mendatang (Purwoko, 2002).

Pemanfaatan hutan yang tidak disertai dengan upaya pelestarian akan menimbulkan gangguan terhadap hutan seperti menurunnya produktivitas sumber daya alam hutan. Menurut *Forest Watch* Indonesia (2015), laju kerusakan hutan mencapai 1,1 juta hektar per tahun pada periode 2009–2013 yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat mulai merambah hutan. Salah satu alternatif pemecahan masalah terhadap tekanan sumber daya hutan yaitu adanya program pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan secara bersama-sama melalui program hutan kemasyarakatan atau yang biasa disebut HKM.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pihak yang menjadi pemohon untuk hutan kemasyarakatan ini adalah ketua kelompok masyarakat, ketua gabungan kelompok tani hutan, ketua koperasi. Hutan kemasyarakatan hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Perhutanan Sosial yaitu adalah sebuah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam sebuah kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan suatu kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan (Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Perhutanan Sosial).

Program perhutanan sosial, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewenangan antara lain melakukan sosialisasi perhutanan sosial kepada masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan di wilayahnya, memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan usulan permohonan perhutanan sosial yang ada di wilayahnya, memfasilitasi masyarakat dalam kebijakan kerjasama dan kemitraan. Semangat untuk percepatan *Program Community Base Forest Management (CBFM)* melalui skema hutan kemasyarakatan walaupun sudah berjalan lebih baik tetapi masih banyak mengalami kendala. Tidak hanya dibutuhkan pendampingan di tingkat lapang dan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten atau Provinsi namun yang tidak kalah penting adalah dukungan politisi legislatif di dalam hal anggaran dan komitmen kepastian hak pengelolaan di dalam kawasan hutan dengan kata lain penguatan peran Pemerintah/Kesatuan pengelola hutan (KPH) dan stakeholder dalam kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat tani hutan kemasyarakatan. Para pihak yang diharapkan berkomitmen adalah Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat, Kelompok Tani Hutan (KTH), pemegang izin Hutan kemasyarakatan dan pihak lain. Legitimasi, kepastian pengelolaan diakui dan harus dibuktikan dengan adanya perizinan IUPHkm (Izin Usaha Pengelolaan Hutan kemasyarakatan).

Pendekatan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat ini dikenal dengan kehutanan masyarakat (*social forestry*), Abidin dalam (Melly. Dkk: 2018) menyatakan bahwa pengelolaan hutan dari sisi fungsi produksinya diarahkan menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Thomson menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau di sekitar hutan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan hutan dalam rangka *social forestry*. Agung mengemukakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari. Izin kelola kebijakan Hutan

Kemasyarakatan di Kecamatan Sendang Agung kabupaten Lampung Tengah terhadap Gabungan kelompok Tani Wana Tekad Mandiri diawali dengan proses Sosialisasi, Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap anggota kelompok yang tergabung dalam Gabungan kelompok Tani Wana Tekad Mandiri tersebut. Gabungan Kelompok Tani Wana Tekad Mandiri mengelola Hutan kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2011 juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewenangan antara lain melakukan sosialisasi perhutanan sosial kepada masyarakat yang berada di dalam sekitar hutan di wilayahnya kecamatan Sendang Agung, memfasilitasi serta membina masyarakat dalam menyampaikan usulan permohonan perhutanan sosial yang ada di wilayah Kecamatan Sendang Agung.

Sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 ada semacam ketakutan dari kelompok tani sebab, maraknya penebangan hutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab diluar gabungan kelompok tani. Sehingga kelompok masyarakat yang melakukan penebangan hutan liar tidak mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap Gabungan kelompok Tani di wilayah Kecamatan Sendang Agung. Selain itu, kendala Pemerintah untuk memberikan Pembinaan terhadap Gabungan Kelompok Tani adanya keterbatasan jarak, Sumber Daya Manusia Way Waya 7 Tangkit Tebak dan keterbatasan Anggaran (*Sumber: Hasil wawancara Pra-riset, 14 Oktober 2019*).

Berdasarkan dari hal tersebut, peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai Strategi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan ( Studi di Gapoktan di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah ).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Strategi

Strategi ialah langkah dan cara yang akan digunakan sebuah organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Seperti menurut Salusu, strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya efektif dan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan (Salusu, 2006).

Menurut Nawawi dari sudut etimologis penggunaan kata 'Strategik' dalam manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang merancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah ada tujuan strategi organisasi (Nawawi, 2012).

Menurut Hatch strategi muncul sebagai bidang tersendiri dalam teori organisasi pada akhir dekade 1950-an, tidak lama setelah berkembangnya perspektif modern atau teori sistem. Kemudian Robbins menambahkan bahwa di masa sebelumnya, strategi hanya dianggap sebagai salah satu variabel yang menentukan terhadap struktur organisasi (Kusdi, 2009).

Dapat disimpulkan bahwa menurut para ahli tentang pengertian strategi secara garis besar, strategi adalah seni cara dalam menggunakan alat, langkah menyusun rencana tercapainya tujuan dengan baik dan terlaksana dengan efektif serta tepat sasaran. Suatu tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi yang memiliki dampak jangka panjang dan berorientasi untuk masa depan.

### Manajemen Strategi

Manajemen strategi menurut David ialah sebuah seni dan sains dalam memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memuat organisasi dapat memperoleh tujuannya. Manajemen strategi berfokus pada pengintegrasian manajemen, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan serta sistem informasi untuk

memperoleh kesuksesan organisasi (David, 2004).

Manajemen strategi memiliki pengertian yang sangat banyak, baik secara teoritis maupun dalam praktik manajemennya. Salah satunya pendapat Wheelen Hunger Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi menekankan dan mengutamakan pengamatan dan evaluasi mengenai peluang dan ancaman lingkungan eksternal perusahaan dengan melihat kekuatan dan kelemahan dalam lingkungan internal perusahaan (Umar, 2010).

Berdasarkan para ahli diatas maka peniliti menyimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan keputusan dan tindakan yang berpengaruh terhadap jalannya organisasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan.

### **Proses Manajemen Strategi**

David menyatakan bahwa proses manajemen strategi memiliki 3 tahap (David, 2004), yaitu :

1. Perumusan strategi termasuk mengembangkan misi bisnis, mengenali peluang dan ancaman perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektif jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan.
2. Implementasi strategi, menuntut perusahaan untuk menetapkan objektif tahunan, melengkapi dengan kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan.
3. Evaluasi strategi, merupakan tahap akhir dalam manajmen strategi, terdapat tiga macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi, yaitu meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang, mengukur perestasi, dan mengambil tindakan korektif..

Dari beberapa tahapan diatas, maka peneliti akan berfokus pada tahap Implementasi Stategi karena peneliti ingin mengetahui bagaimana proses Pembinaan dan Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani Kashuri Wana Tekad Mandiri kecamatan sendang Agung

### **Implementasi Strategi**

David mengungkapkan bahwa dalam mengimplementasikan strategi mempengaruhi organisasi dari puncak hingga dasar, termasuk area-area fungsional dan divisional bisnis. Bahkan rencana strategi yang sempurna secara teknis akan hanya memberikan sedikit tujuan jika tidak diimplementasikan. Sifat dari implementasi strategi adalah dikelola selama tindakan, berfokus pada efisiensi, utamanya pada proses operasional, masyarakat motivasi khusus dan kemampuan kepemimpinan, serta koordinasi antara banyak individual (David, 2016).

Menurut Wheelen dan Hunger mengartikan implementasi strategi sebagai proses dimana manejemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur . proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan. Kecuali ketika diperlukan perubahan secara drastis pada perushaan, secara khusus dengan pertimbangan dari manajemen puncak. Kadang-kadang dirujuk sebagai perencanaana operasional, implementasi strategi sering melibatkan keputusan sehari-hari dalam alokasi sumber daya

### **III. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya dan peran aktor didalamnya. Sedangkan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data skunder,

data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi secara langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku cetak, dokumentasi dan beberapa sumber yang bersal dari situs internet yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak luas dalam fenomena. Di dalam penelitian ini penulis sependapat dengan Mile dan Huberman dalam Sugiyono (2012 : 247), menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada subbab sebelumnya, maka peneliti melakukan pembahasan terkait hasil temuan di lapangan. Tahap ini peneliti melakukan pembahasan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, serta data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Adapun pembahasan mengenai “Peranan Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak Dalam Perumusan Kebijakan Publik Berwawasan Budaya di Kabupaten Lampung Barat” akan dideskripsikan sebagai berikut:

Gabungan kelompok tani yang kuat dan mandiri dapat dilihat dengan adanya pertemuan pengurus secara berkala dan berkesinambungan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi, memiliki aturan atau norma yang disepakati dan ditaati bersama, juga memiliki pencatatan atau pengadministrasian organisasi yang rapih, sehingga dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama disektor hulu dan hilir, serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usah para petani umumnya dan

anggota kelompok tani khususnya, yang ditandai dengan adanya kemitraan dengan pihak lain, dan adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha kegiatan kelompok.

#### Strategi Pembinaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah

Strategi pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah adalah sebelum melaksanakan program atau kegiatan dalam pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sangat diperlukan adanya pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelola Hutan terhadap ketua Gapoktan, sub kelompok atau masyarakat di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah yang sudah bergabung agar pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik sesuai seperti yang sudah di musyawarahkan bersama. Strategi pembinaan mempunyai tujuan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan dalam melaksanakan kegiatan atau program Gapoktan Wana Tekad Mandiri, yaitu dengan cara mengembangkan keahlian, mengembangkan pengetahuan serta mengembangkan sikap. Sebelum melaksanakan program atau kegiatan ini harus melakukan perencanaan agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan oleh penyuluh ataupun masyarakat dan bisa dapat dipahami. Berdasarkan Strategi Pembinaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah menurut Mathis (2002) ada beberapa tujuan pembinaan yaitu sebagai berikut:

#### Pengembangan pengetahuan terhadap anggota Gapoktan Wana Tekad Mandiri

Pengembangan pengetahuan terhadap anggota Gapoktan Wana Tekad Mandiri untuk memberikan dan meningkatkan suatu pengetahuan kepada anggota Gapoktan yang diberikan oleh penyuluh yang sudah di tunjuk langsung oleh KPH seperti pengetahuan tentang peraturan-peraturan kehutanan. Pengetahuan diberikan dalam bentuk

sosialisasi kepada masyarakat Gapoktan Wana Tekad Mandiri sosialisasi yang diberikan tentang pengetahuan kehutanan, peraturan kehutanan yang harus diterapkan kepada masyarakat.

Pengembangan keterampilan terhadap anggota Gapoktan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan antara anggota untuk mengetahui seberapa pentingnya melakukan tugas yang diberikan dalam sebuah organisasi. Pengembangan keterampilan yang dilakukan oleh penyuluh yang ditunjuk oleh KPH ataupun PKSM untuk masyarakat Gapoktan Wana Tekad Mandiri. Pengembangan keahlian dilakukan untuk melatih masyarakat dalam melakukan tugas masing-masing.

Sikap kerjasama terhadap sesama anggota Gapoktan sangat dibutuhkan agar program atau kegiatan dapat berjalan dengan semestinya. Sebab dalam sebuah organisasi bukan hanya ada 1 orang melainkan lebih dari 2 orang maka sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan sebelumnya anggota Gapoktan dapat menerapkan pengembangan sikap kerjasama. Pentingnya pengembangan sikap kerjasama terhadap sesama anggota Gapoktan Wana Tekad Mandiri sebagai kelompok dalam organisasi mendapatkan banyak manfaat dari anggota kelompok lain, membimbing dan memberi inspirasi dimana semua kelompok dapat mempengaruhi motivasi para anggota Gapoktan Wana Tekad Mandiri dalam menggunakan cara-cara baik.

### **Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah**

Strategi pemberdayaan masyarakat adalah dimana upaya Gapoktan Wana Tekad Mandiri meningkatkan kemampuan dan melaksanakan kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Menurut Neta (2019) setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai yang sudah di rencanakan serta kemandirian

masyarakat sekitar hutan untuk mendapatkan pengembangan kapasitas dan memberikan akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan dalam melakukan bimbingan dan konseling harus dapat berjalan dengan baik karena pemberdayaan dalam melakukan bimbingan sangat penting dalam organisasi. Bimbingan atau melatih memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas yang sudah diberi. Apabila masyarakat tidak diberikan bimbingan dan konseling maka masyarakat hanya diberikan pengetahuan tanpa penyuluh langsung menerapkan masyarakat.

Pelatihan untuk meningkatkan dan pengetahuan menggunakan strategi yaitu peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap orang di dalam organisasi supaya memiliki kemampuan untuk menyikapi bagaimana nanti dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam kelompok Gapoktan Wana Tekad Mandiri pada akhirnya membantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi, antara lain melalui penerapan atau pelaksanaan kegiatan musyawarah untuk mendapat solusi yang baik.

Pelatihan dalam strategi kebijakan dan perorganisasian masyarakat terhadap Gapoktan Wana Tekad Mandiri harus dilakukan supaya mencapai beberapa tujuan yang baik untuk sebuah organisasi, Membantu memecahkan persoalan operasional dengan cepat dan tepat apalagi organisasi Gapoktan Wana Tekad Mandiri bukan organisasi yang kecil tetapi organisasi yang lumayan besar yang terdiri dari 3.309 anggota kelompok yang bergabung. Memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dalam bekerja sehingga hasil yang dicapai akan maksimal.

### **Kendala-kendala yang dialami oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dalam Implementasi Melalui Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan**

Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang akan dikaji adalah kendala yang terjadi oleh KPH dalam melakukan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Gapoktan Wana Tekad Mandiri terkadang tidak berjalan sesuai yang diinginkan, karena pada hakekatnya dalam melakukan program atau melakukan turun lapangan ada saja kendala yang dihadapi. Beberapa kendala yang dialami oleh KPH yaitu kendala internal dan kendala eksternal bahkan kendala juga dirasakan oleh Gapoktan Wana Tekad Mandiri.

Kendala internal atau kendala didalam sebuah organisasi yang menyebabkan program atau kegiatan terhambat. Kendala internal juga disebabkan oleh masyarakat atau anggota Gapoktan Wana Tekad itu sendiri yang menyebabkan program atau kegiatan terhambat dan dapat menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan lancar sesuai yang diinginkan. Kendala dalam sebuah kelompok Gapoktan Wana Tekad Mandiri adalah tentang administrasi dimana masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan sewenang-wenang menyalahgunakan hutan padahal sudah ada peraturan dan surat izin yang sudah di terapkan.

Selain kendala internal Gapoktan Wana Tekad Mandiri juga menghadapi kendala eksternal dimana kondisi ini dapat membuat organisasi tidak berjalan dengan lancar. Tidak semua program atau kegiatan dalam organisasi bisa berjalan dengan baik adakalanya terdapat beberapa kendala maka disini Gapoktan Wana Tekad Mandiri terdapat kendala eksternal. Kendala eksternal bisa muncul dari berbagai macam dari dalam organisasi tersebut atau diluar organisasi yang dilakukan oleh masyarakat atau juga kendala dari kejadian yang tidak terduga. Kendala eksternal ini dapat dikatakan stakeholder, yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program.

## V. PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah yaitu: meliputi 3 point strategi pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Pengembangan pengetahuan bagi anggota Gapoktan Wana Tekad Mandiri bertujuan meningkatkan pengetahuan kepada anggota Gapoktan Wana Tekad Mandiri yang diberikan oleh penyuluh yang sudah di tunjuk langsung oleh KPH seperti melakukan kegiatan sosialisasi tentang inovasi, serta pengetahuan tentang peraturan-peraturan kehutanan. Pengembangan keterampilan bagi anggota Gapoktan Wana Tekad Mandiri bertujuan memberikan pelatihan administratif dan pembinaan peningkatan keterampilan antar anggota Gapoktan untuk mengetahui seberapa pentingnya melakukan tugas yang diberikan dalam sebuah organisasi.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Pelatihan tentang Administrasi lebih ditingkatkan dan diterapkannya peraturan bagi masyarakat Gapoktan Wana Tekad Mandiri agar tidak terjadi penggarapan secara liar atau sewenang-wenang.
2. Diberikannya bimbingan kepada masyarakat agar pengetahuan kelompok Gapoktan Wana Tekad Mandiri atau masyarakat lebih luas dan menerapkan tugas atau peraturan yang diberikan oleh penyuluh tentang kehutanan dapat berjalan dengan baik.
3. Pemerintah seharusnya lebih cepat dan tanggap dengan pengaduan ataupun adanya masalah dalam organisasi kelompok Gapoktan Wana Tekad Mandiri dengan melakukan

- musyawarah dalam memecahkan dan mencari solusi yang terbaik.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti dan menghadiri sosialisasi yang dilakukan penyuluh dengan tidak adanya kesalahpahaman komunikasi antar anggota Gapoktan Wana Tekad Mandiri.
  5. Dinas Kehutanan dapat mengalokasikan anggaran dana kepada kelompok Gapoktan Wana Tekad Mandiri yang sudah mengajukan supaya dapat memperbaiki jalan dan juga memenuhi anggaran untuk mengembangkan usaha kepada masyarakat di sekitar hutan .

Mardikanto, Totok, dan Soebianto, Poerwoko. 2015. Pemberdayaan Masyarakat. Edisi Revisi. ALFABETA. Bandung

Mathis Robert, Jackson John. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba empat

Mely, Oktarine. DKK. 2018. Peran Perum Perhutani Dalam Pembinaan Masyarakat Sekitar Hutan. Lampung: (online)

Nawawi, Hadari. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan ( Dengan Ilustrasi Dibidang Pendidikan ). ( Yogyakarta: Gadjah Mada, 2012 ), Hlm. 147.

Neta, Yulia. Kagungan, Dian. DKK. 2019. Hutan Kemasyarakatan, “ Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera Mandiri “. Lampung. Penerbit: Pusaka Media

Rosalinda, Emi. 2008. Hutan Kemasyarakatan. ALFABETA. Bandung

Sugiyono, 2016. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Salusu, J. 2006. Pengambilan keputusan stratejik untuk organisasi publik dan organisasi nonprofit. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Umar, Husein. 2010. Desain penelitian manajemen stratejik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wheele, Thomas. L. And J. Dvid, Hunger. 2001. Manajemen Strategis Edisi Kelima. Yogyakarta: Penerbit Andi.

#### **Sumber Jurnal :**

Kagungan. D., 2012. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Bandar Lampung: Jurnal Administrasi Publik. Vol. 2, No. 1

Kagungan, D., Neta, Y., & Kaskoyo, H. (2019). Membangun Kemandirian Masyarakat Tani Hutan Kemasyarakatan Melalui Penguatan Peran Stakeholders Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. Prosiding Sefila, 103-112.

#### **Sumber Dokumen :**

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Asep Yunan Firdaus. 2018. Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Pencepatan Reformasi Tenurial Hutan . Bogor, Indonesia: CIFOR.

David, Fred R., dan Forest R. David, Manajemen Strategik : Suatu pendekatan Keunggulan Bersaing\_ konsep, Terj. Novita Puspasari dan Liza Nurbani Puspitasari, ( Jakarta : Selemba Empat, 2016)

David, F.R. 2004. "Manajemen Strategis: Konsep. Edisi ketujuh". PT. Prenhallindo, Jakarta.

Ivancevich, John M, Robert Konopaske dan Michael T Matteso, 2009. Perilaku dan Manajemen Organisasi, Edisi Ketujuh, Erlangga, Jakarta.

Kagungan. Dian, 2012. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Bandar Lampung: Jurnal Administrasi Publik. Vol. 2, No. 1

Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Republik Indonesia Nomor  
P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/2016  
tentang Perhutanan Sosial